



STRATEGI PENINGKATAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN

Nazla Rachma Panggabean¹
Nopsita Dekawai Tampubolon²
Universitas Darma Agung Medan^{1,2}
Email : nazlarachmapanggabean@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah serta menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Tesis ini bertujuan untuk menyusun strategi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nias Selatan dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Metode analisis artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep Fred R. David, yaitu analisis *Matriks Internal Factor Evaluation* dan *Matriks External Factor Evaluation* (The Input Stage), analisis SWOT (The Matching Stage), dan pengambilan keputusan (The Decision Stage). Strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah dengan meningkatkan infrastruktur baik di bidang transportasi maupun akomodasi hotel dan restoran memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan sumber daya manusia yang memadai dan potensi wisata daerah Kabupaten Nias Selatan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional; dengan kedatangan wisatawan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel dan restoran.

Kata kunci :Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak hotel dan Restoran

ABSTRACT

Regional Autonomy provides wider authority for regional governments to regulate and manage regional government affairs as well as explore and manage sources of Regional Original Revenue (PAD) optimally. This thesis aims to develop a strategy to increase the potential of Regional Original Revenue (PAD) in South Nias Regency from the Hotel Tax and Restaurant Tax sector. The method of analyzing this article was carried out using a method based on the concept of Fred R. David, namely the analysis of the *Internal Factor Evaluation Matrix* and the *External Factor Evaluation Matrix* (The Input Stage), SWOT analysis (The Matching Stage), and decision making (The Decision Stage). The strategy that can be carried out in increasing revenue from Hotel Tax and Restaurant Tax is to improve the infrastructure in both the transportation and hotel and restaurant accommodation sectors by utilizing the regional autonomy policy as wide as possible by using adequate human resources and the tourism potential of the South Nias Regency to

attract tourists. domestic and international tourists; With the arrival of tourists, it can increase people's per capita income and can increase the participation of taxpayers in organizing hotel and restaurant tax collection.

Keywords: Strategy, local revenue, hotel and restaurant taxes

I. PENDAHULUAN

Peranan pemerintah dalam membangun negara sangat penting terutama untuk memajukan dan meningkatkan tingkat kemandirian setiap negara, menjalankan kegiatan tentu membutuhkan dana operasional, maka yang menjadi sumber utama pembiayaan peranan pemerintah dalam menjaga, menstabilkan, membangun, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersumber dari pajak.

Pembangunan daerah merupakan bagian pembangunan nasional, tujuan pembangunan yaitu : Pertama, peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal , kesehatan dan perlindungan. Kedua, Peningkatan Standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai- nilai budaya dan manusia. Secara keseluruhan hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well bring*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa. Ketiga, perluasan pemilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghambat dan perasaan bergantung kepada orang dan negara-negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan (Todaro, 2011 : 27).

Di sahkan Undang- Undang No. 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan di revisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan di revisi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam kemandirian keuangan.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yaitu : (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. (b) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah, dan (c) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002 : 59). Otonomi berasal dari bahasa yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri dan pemerintahan sendiri .Menurut *Encyclopedia of socialscience*, pengertian otonomi adalah *the legal self sufficiency of socialand its actual independence*. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan

kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*) Sjafrizal, 2014 : 106.

Dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan untuk menciptakan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali seluruh sumber-sumber keuangan daerah, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Ersita, 2016 : 890)

Ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain: (1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. (3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. (4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Wenny, 2012 : 41).

Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa fungsi budgetair merupakan fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulated*) yang artinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam social dan ekonomi dalam hal membiayai pengeluaran pemerintah pusat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta untuk pembayaran bunga hutang negara

Pajak hotel dan restoran merupakan sebagian sumber utama pendapatan daerah dalam proses pembangunan. Untuk pembiayaan belanja daerah, Pemerintah

Daerah menggunakan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat juga membantu Pemerintah Daerah dalam pembiayaan belanja daerah berupa transfer dana Perimbangan (bagian dari bagi hasil pajak dan non pajak) dan Dana Alokasi Umum sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan nilai PAD yang dimiliki, berikut target dan realisasi di Kabupaten Nias Selatan selama tiga tahun.

Tabel 1.

| JenisPajak | Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|-------|
| | Tahun | Target | Realisasi | % |
| Pajak Hotel | 2014 | 187.380.000,- | 125.365.000,- | 66,90 |
| | 2015 | 192.665.000,- | 186.370.000,- | 96,73 |
| | 2016 | 195.870.000,- | 181.245.000,- | 92,53 |
| PajakRestoran | 2014 | 44.658.400,- | 19.658.400,- | 44,02 |
| | 2015 | 41.852.000,- | 14.762.000,- | 35,27 |
| | 2016 | 40.396.000,- | 22.386.000,- | 55,42 |

Sumber : Laporan Pajak Hotel dan Restoran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2014-2016

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan penelitian ini menggunakan di Kabupaten Nias Selatan. Dalam metode pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian Ini menggunakan teknik observasi, interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu : (1) data primer berupa rekaman atau video dan juga catat-mencatat saat wawancara akan dimulai. Dan (2) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: mengelompokkan, memilih dan memilah data, lalu kemudian menganalisisnya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Nias Selatan

Dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan, maka perlu di buat strategi sebagai berikut:

IFE (*Internal Factor Evaluation*)

Memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan utama perusahaan dengan cara menganalisa faktor-faktor audit internal. IFE memiliki lima tahapan sebagai berikut.

- a) Tuliskan faktor internal utama seperti diidentifikasi dalam proses audit internal. Gunakan total sepuluh hingga dua puluh faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Tuliskan kekuatan lebih dahulu dan kemudian kelemahan. Buatlah sespesifik mungkin, gunakan presentase, rasio dan angka komparatif.
- b) Berikan bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting) untuk masing-masing faktor, Jumlah pembobotan harus sama dengan 1.
- c) Berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor guna mengindikasikan apakah faktor tersebut menunjukkan kelemahan utama (peringkat 1), atau kelemahan minor (peringkat 2) kekuatan minor (peringkat 3), atau kekuatan utama (peringkat 4). perhatikan bahwa kekuatan harus mendapatkan peringkat 3 atau 4 dan kelemahan harus mendapatkan peringkat 1 atau 2.
- d) Kalikan masing -masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang untuk masing -masing variabel.
- e) Jumlahkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi.

Berapa pun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFE, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 4,0, dengan rata-rata 2,5. Total rata-rata tertimbang dibawah 2,5 menggambarkan organisasi yang lemah secara internal, sementara total nilai di atas 2,5 mengindikasikan posisi internal yang kuat.

Gambar 1.
Contoh matriks IFE

| KEKUATAN | BOBOT | RATING | SKOR |
|------------------------------|-------|--------|------|
| Kekuatan 1 | | | |
| Kekuatan 2 | | | |
| Kekuatan 3 | | | |
| Kekuatan 4 | | | |
| KELEMAHAN | BOBOT | RATING | SKOR |
| Kelemahan 1 | | | |
| Kelemahan 2 | | | |
| Kelemahan 3 | | | |
| Kelemahan 4 | | | |
| Total Skor Pembobotan | | | |

Sumber: David (2006)

Tabel 2.
IFE (*Internal Factor Evaluation*)

| Faktor | Bobot | Rating | Nilai |
|---|-------|--------|-------|
| Kelemahan Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | 0,094 | 1 | 0,094 |

| | | | |
|--|--------------|----------|--------------|
| Masih kurangnya Sumber daya Manusia | 0,092 | 1 | 0,092 |
| Masih kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan | 0,091 | 1 | 0,091 |
| Kondisi infrastuktur jalan yang kurang memadai | 0,096 | 2 | 0,192 |
| Potensi ketersediaan akomodasi hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | 0,095 | 2 | 0,190 |
| Alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD Kabupaten Nias Selatan masih minim | 0,095 | 1 | 0,095 |
| Sub total | 0,563 | 8 | 0,754 |

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah), 2017

EFE (Eksternal Factor Evaluation)

Memungkinkan para penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Memiliki lima tahapan sebagai berikut.

- a) Tuliskan faktor eksternal seperti diidentifikasi dalam proses audit eksternal. Tuliskan beberapa faktor yang mencakup peluang dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan dan industrinya. Tuliskan peluang lebih dahulu dan kemudian ancaman. Buatlah spesifik mungkin, gunakan presentase, rasio dan angka komparatif.
- b) Berikan bobot yang berkisar dari 0,0 (tidak penting) hingga 1,0 (sangat penting) untuk masing-masing faktor. peluang sering kali diberi bobot yang lebih tinggi dari ancaman, tetapi ancaman juga dapat diberi bobot yang tinggi jika mereka sangat serius atau sangat mengancam. Penjumlahan seluruh bobot harus sama dengan 1,0.
- c) Berikan peringkat 1 sampai 4 untuk masing-masing faktor guna mengindikasikan tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam merespon faktor tersebut, dimana 4 = respon perusahaan superior, 3 = respon perusahaan di atas rata-rata, 2 = respon perusahaan rata-rata, dan 1= respon perusahaan buruk. Penting untuk diperhatikan bahwa ancaman dan peluang dapat diberi peringkat 1,2,3, atau 4.
- d) Kalikan masing -masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel. Jumlahkan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel untuk menentukan total rata-rata tertimbang untuk organisasi.

Gambar 2.

Contoh matriks EFE

| PELUANG | BOBOT | RATING | SKOR |
|------------------------------|-------|--------|------|
| Peluang 1 | | | |
| Peluang 2 | | | |
| Peluang 3 | | | |
| Peluang 4 | | | |
| ANCAMAN | BOBOT | RATING | SKOR |
| Ancaman 1 | | | |
| Ancaman 2 | | | |
| Ancaman 3 | | | |
| Ancaman 4 | | | |
| Total Skor Pembobotan | | | |

Sumber : David (2006)

Tabel 3.

EFE (*External Factor Evaluation*)

| Faktor | Bobot | Rating | Nilai |
|--|--------------|-----------|--------------|
| Peluang | | | |
| Pelaksanaan otonomi di Kabupaten Nias Selatan | 0,111 | 2 | 0,222 |
| Dukungan undang-undang NO.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang memperbesar cakupan di bidang pariwisata | 0,112 | 2 | 0,224 |
| Kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara untuk menambah minat wisatawan manca negara untuk mengunjungi Kabupaten Nias Selatan | 0,123 | 3 | 0,369 |
| Era masyarakat ekonomi asean yang memungkinkan bebasnya pergerakan orang dan barang di antara sesama negara asean | 0,114 | 4 | 0,456 |
| Sub total | 0,460 | 11 | 1,271 |

| Faktor | Bobot | Rating | Nilai |
|---|--------------|----------|--------------|
| Tantangan | | | |
| Kepariwisata di Kota dan Kabupaten lain memiliki Kelengkapan yang berbeda | 0,105 | 1 | 0,105 |
| Moda transportasi yang masih terbatas | 0,110 | 2 | 0,220 |
| Sub total | 0,215 | 3 | 0,325 |

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah), 2017

Tahap Pencocokan (*The Matching Stage*)

Tujuan tahap pencocokan ini adalah menghasilkan strategi alternatif yang layak, bukan untuk memilih atau menetapkan strategi mana yang terbaik. Tahap pencocokan dari kerangka kerja perumusan strategi, dilakukan dengan menggunakan matriks SWOT. Dalam penggunaan matriks SWOT sangat ditentukan oleh informasi yang diperoleh dari tahap input untuk mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan tantangan eksternal.



Mencocokkan faktor-faktor sukses kritis internal dan eksternal merupakan kunci untuk secara efektif menghasilkan strategi alternatif yang layak dan merupakan bagian yang sulit untuk mengembangkan matriks SWOT, karena memerlukan penilaian yang baik dan tidak ada satupun kecocokan terbaik. Oleh karena itu tidak semua strategi yang dikembangkan dalam matriks SWOT akan dipilih untuk diimplementasikan. Agar menghasilkan alternatif-alternatif tindakan strategis yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka disusun beberapa alternatif strategi melalui tabel analisis SWOT, maka disusun beberapa alternatif strategi melalui tabel analisis SWOT, yaitu seperti yang terlihat pada.



Tabel 4.
Tahap Analisis SWOT

| Peluang | Kekuatan Tersedia peraturan daerah yang menjami ndan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | Dukungan dan peranan berbagai Dinas dan lembaga di Kabupaten Nias Selatan | Potensi bermacam-macam daya tarik pariwisata di kabupaten Nias Selatan | Kelemahan Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di kabupaten nias selatan | Masih kurangnya sumber daya manusia | Masih kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan | Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai | Potensi ketersediaan akomodasi hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | Alokasi anggaran untuk pariwisata a dari APBD Kabupaten Nias Selatan |
|---|--|---|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Pelaksanaan otonomi di Kabupaten Nias Selatan | Strategi So -meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran melalui penyuluhan terhadap wajib pajak(s1,s2,o1,02 -meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran di kabupaten nias selatan dengan memanfaatkan perkembangan dan kualitas promosi yang lebih baik(s3,o3,04) | | | Strategi wo -penertipan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Nias Selatan(W1,O1) -Meningkatkan kualitas SDM yang belum memadai dengan mengusahakan pelatihan baik di bidang kepariwisataan maupun bidang perpajakan, dan meningkatkan kualitas dari infrastruktur jalan,hotel dan restoran itu semua bisa terwujud apabila ada bantuan dari pemerintah pusat dan daerah(W2,W3,W4,W5,O1,O2,O3,O4) | | | | | |
| Dukungan undang-undang NO.10 | Strategi ST | | | Strategi WT | | | | | |



| | | |
|---|---|--|
| Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang memperbesar cakupan di bidang kepariwisataan | -Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak pengusaha pariwisata terkait untuk membangun kepariwisataan yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan lestari.(S1,S2,S3 T1.) -Meningkatkan citradaerah Kabupaten Nias Selatan, hotel dan restoran.(S2,T2) | -Menghadapi kecendrungan persaingan dengan daerah lain yang semakin kompetitif dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM baik di bidang pariwisata dan perpajakan.(W1,W2,W3,T1) -Menyiapkan moda transportasi,hotel dan restoran yang lebih baik lagi, ini bisa terwujud dengan bantuan dana APBD dari pemerintah kota,provinsi dan pusat.(W4,W5,T2) |
| Kebijakan bebas visa bagi sejumlah negara untuk menambah minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Nias Selatan | | |
| Era masyarakat ekonomi asean yang memungkinkan bebasnya pergerakan orang dan barang di antara negara asean | | |
| Tantangan | | |
| Kepariwisataan di kota dan Kabupaten lain memiliki kelengkapan yang berbeda | | |
| Moda transportasi yang masih terbatas | | |

Tahap Pengambilan Keputusan

Teknik-teknik dalam tahap pencocokkan yang dijelaskan di atas menghasilkan strategi alternatif yang layak. Selanjutnya dilakukan tahapan pengambilan keputusan dengan menggunakan *Quantitative Strategies Planning Matrix* (QSPM) atau Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif. Penggunaan matriks ini secara sasaran menunjukkan strategi alternatif mana yang terbaik untuk dipilih dengan menggunakan informasi dari tahap input dan tahap pencocokkan di atas.

QSPM adalah alat untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara obyektif berdasarkan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Secara konseptual tujuan QSPM adalah untuk menetapkan daya tarik relatif (*relative attractiveness*) dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih pada matriks SWOT, untuk menentukan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan dengan menggunakan penilaian dalam menyeleksi strategi alternatif tersebut.

Tabel 5.
Analisis QSPM (Strategi SO)

| Internal dan Eksternal | A | | B | |
|--|----|-------|----|-------|
| | AS | TAS | AS | TAS |
| Kekuatan | | | | |
| Tersedia peraturan daerah yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan. | 4 | 0,464 | 2 | 0,232 |
| Dukungan dan peranan berbagai Dinas dan lembaga di Kabupaten Nias Selatan. | 3 | 0,324 | 3 | 0,324 |
| Potensi bermacam-macam daya tarik pariwisata di Kabupaten Nias Selatan. | 2 | 0,208 | 4 | 0,416 |
| Kelemahan | | | | |
| Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | 3 | 0,282 | 2 | 0,188 |
| Masih kurangnya SDM | 2 | 0,184 | 3 | 0,276 |
| Masih kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan | 4 | 0,364 | 1 | 0,091 |
| Kondisi infrastruktur yang kurang memadai | 2 | 0,192 | 2 | 0,192 |
| Potensi ketersediaan akomodasi hotel dan restoran yang belum memadai di Kabupaten Nias Selatan | 3 | 0,285 | 3 | 0,285 |
| Alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD Kabupaten Nias Selatan masih minim | 3 | 0,285 | 2 | 0,190 |
| Peluang | | | | |
| Pelaksanaan otonom di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,222 | 2 | 0,222 |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--------------|
| Dukungan UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang memperbesar cakupan di bidang pariwisata | 3 | 0,336 | 2 | 0,224 |
| Kebijakan Bebas visa bagi sejumlah negara untuk menambah minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Nias Selatan | 1 | 0,123 | 3 | 0,369 |
| Era masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan bebasnya pergerakan orang dan barang di antara sesama negara asean | 1 | 0,114 | 2 | 0,228 |
| Tantangan | | | | |
| Kepariwisataan di kota dan kabupaten lain memiliki kelengkapan yang berbeda | 1 | 0,105 | 2 | 0,210 |
| Moda transportasi yang masih terbatas | 2 | 0,220 | 2 | 0,220 |
| Jumlah | | 3,423 | | 3,667 |
| Jumlah total TAS | | 7,090 | | |

Sumber: hasil Penelitian (Diolah), 2017

Berdasarkan Tabel hasil QSPM untuk SO di atas maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

Strategi SO

1. Meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran melalui penyuluhan terhadap wajib pajak(S1,S2,O1,O2).
2. Meningkatkan promosi pariwisata serta keberadaan hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan dengan memanfaatkan perkembangan dan kualitas promosi yang lebih baik(S3,O3,O4).

Tabel 6.
Analisis QSPM (Strategi WO)

| Internal dan Eksternal | A | | B | |
|--|----|-------|----|-------|
| | AS | TAS | AS | TAS |
| Kekuatan | | | | |
| Tersedia peraturan daerah yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan. | 3 | 0,348 | 2 | 0,232 |
| Dukungan dan peranan berbagai Dinas dan lembaga di Kabupaten Nias Selatan. | 2 | 0,216 | 3 | 0,324 |
| Potensi bermacam-macam daya tarik pariwisata di Kabupaten Nias Selatan. | 1 | 0,104 | 2 | 0,208 |
| Kelemahan | | | | |
| Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | 3 | 0,282 | 2 | 0,188 |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|-------|
| Masih kurangnya SDM | 2 | 0,184 | 4 | 0,368 |
| Masih kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan | 3 | 0,273 | 4 | 0,364 |
| Kondisi infrastruktur yang kurang memadai | 2 | 0,192 | 3 | 0,288 |
| Potensi ketersediaan akomodasi hotel dan restoran yang belum memadai di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,190 | 3 | 0,285 |
| Alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD Kabupaten Nias Selatan masih minim | 2 | 0,190 | 3 | 0,285 |
| Peluang | | | | |
| Pelaksanaan otonom di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,222 | 2 | 0,222 |
| Dukungan UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang memperbesar cakupan di bidang pariwisata | 2 | 0,224 | 2 | 0,224 |
| Kebijakan Bebas visa bagi sejumlah negara untuk menambah minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Nias Selatan | 1 | 0,123 | 3 | 0,369 |
| Kepariwisata di kota dan kabupaten lain memiliki kelengkapan yang berbeda | 1 | 0,105 | 2 | 0,210 |
| Tantangan | | | | |
| Kepariwisata di kota dan kabupaten lain memiliki kelengkapan yang berbeda | 1 | 0,105 | 1 | 0,105 |
| Moda transportasi yang masih terbatas | 2 | 0,220 | 2 | 0,220 |
| Jumlah | | 2,987 | | 4,024 |
| Jumlah total TAS | | 7,011 | | |

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah), 2017.

Berdasarkan Tabel hasil QSPM untuk WO di atas maka dirumuskan , sebagai berikut:

1. penertipan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Nias Selatan(W1,O1).
2. Meningkatkan kualitas SDM yang belum memadai dengan mengusahakan pelatihan baik di bidang kepariwisataan maupun bidang perpajakan, dan meningkatkan kualitas dari infrastruktur jalan, hotel dan restoran itu semua bisa

terwujud apabila ada bantuan dari pemerintah pusat dan daerah(W2,W3,W4,W5,O1,O2,O3,O4).

Tabel 7.
Analisi QSPM (Strategi ST)

| Internal dan Eksternal | A | | B | |
|--|----|-------|----|-------|
| | AS | TAS | AS | TAS |
| Kekuatan | | | | |
| Tersedia peraturan daerah yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan. | 2 | 0,232 | 2 | 0,232 |
| Dukungan dan peranan berbagai Dinas dan lembaga di Kabupaten Nias Selatan. | 2 | 0,216 | 2 | 0,216 |
| Potensi bermacam-macam daya tarik pariwisata di Kabupaten Nias Selatan. | 3 | 0,312 | 3 | 0,312 |
| Kelemahan | | | | |
| Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,188 | 1 | 0,094 |
| Masih kurangnya SDM | 2 | 0,184 | 2 | 0,184 |
| Masih kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan | 2 | 0,182 | 1 | 0,091 |
| Kondisi infrastruktur yang kurang memadai | 3 | 0,288 | 3 | 0,288 |
| Potensi ketersediaan akomodasi hotel dan restoran yang belum memadai di Kabupaten Nias Selatan | 3 | 0,285 | 3 | 0,285 |
| Alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD Kabupaten Nias Selatan masih minim | 3 | 0,285 | 2 | 0,190 |
| Peluang | | | | |
| Pelaksanaan otonom di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,222 | 2 | 0,222 |
| Dukungan UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang memperbesar cakupan di bidang pariwisata | 2 | 0,224 | 2 | 0,224 |
| Kebijakan Bebas visa bagi sejumlah negara untuk menambah minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,246 | 2 | 0,246 |

| | | | | |
|---|---|-------|---|--------------|
| Era masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan bebasnya pergerakan orang dan barang di antara sesama negara asean | 2 | 0,228 | 2 | 0,228 |
| Tantangan | | | | |
| Kepariwisata di kota dan kabupaten lain memiliki kelengkapan yang berbeda | 3 | 0,315 | 2 | 0,210 |
| Moda transportasi yang masih terbatas | 2 | 0,220 | 3 | 0,330 |
| Jumlah | | 3,443 | | 3,352 |
| Jumlah total TAS | | | | 6,795 |

Sumber: Hasil Penelitian (Diolah), 2017.

Berdasarkan Tabel hasil QSPM untuk ST di atas maka dirumuskan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan berbagai pihak pengusaha pariwisata terkait untuk membangun kepariwisataan yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan lestari.(S1,S2,S3 T1).
2. Meningkatkan citra dan mutu moda transportasi, hotel dan restoran.(S2,T2).

Tabel 8
Analisi QSPM Strategi WT

| Internal dan Eksternal | A | | B | |
|--|----|-------|----|-------|
| | AS | TAS | AS | TAS |
| Kekuatan | | | | |
| Tersedia peraturan daerah yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan. | 3 | 0,348 | 3 | 0,348 |
| Dukungan dan peranan berbagai Dinas dan lembaga di Kabupaten Nias Selatan. | 3 | 0,324 | 2 | 0,216 |
| Potensi bermacam-macam daya tarik pariwisata di Kabupaten Nias Selatan. | 2 | 0,208 | 3 | 0,208 |
| Kelemahan | | | | |
| Belum optimalnya sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan | 3 | 0,282 | 1 | 0,094 |
| Masih kurangnya SDM | 3 | 0,276 | 3 | 0,276 |
| Masih kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan | 4 | 0,364 | 1 | 0,091 |
| Kondisi infrastruktur yang kurang memadai | 3 | 0,288 | 2 | 0,192 |
| Potensi ketersediaan akomodasi hotel dan restoran yang belum memadai di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,190 | 3 | 0,285 |

| | | | | |
|---|---|--------------|---|--------|
| Alokasi anggaran untuk pariwisata dari APBD Kabupaten Nias Selatan masih minim | 2 | 0,190 | 2 | 0,190 |
| Peluang | | | | |
| Pelaksanaan otonom di Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,222 | 2 | 0,222 |
| Dukungan UU No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang memperbesar cakupan di bidang pariwisata | 3 | 0,336 | 3 | 0,336 |
| Kebijakan Bebas visa bagi sejumlah negara untuk menambah minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Nias Selatan | 2 | 0,246 | 2 | 0,246 |
| Era masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan bebasnya pergerakan orang dan barang di antara sesama negara asean | 2 | 0,228 | 2 | 0,228 |
| Tantangan | | | | |
| Kepariwisata di kota dan kabupaten lain memiliki kelengkapan yang berbeda | 3 | 0,315 | 2 | 0,210 |
| Moda transportasi yang masih terbatas | 3 | 0,330 | 2 | 0,220 |
| Jumlah | | 3,939 | | 3,4721 |
| Jumlah total TAS | | 7,411 | | |

Sumber: Hasil Penelitian (diolah), 2017

Berdasarkan Tabel hasil QSPM untuk WT di atas maka dirumuskan, sebagai berikut:
Menghadapi kecenderungan persaingan dengan daerah lain yang semakin kompetitif dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM baik di bidang pariwisata dan perpajakan.(W1,W2,W3,T1)

1. Menyiapkan moda transportasi, hotel dan restoran yang lebih baik lagi, ini bisa terwujud dengan bantuan dana APBD dari pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat.(W4,W5,T2).
2. Berdasarkan analisis matriks perencanaan strategi kuantitatif (QSPM) di atas, maka diperoleh hasil bahwa strategi yang direkomendasikan untuk mendapatkan prioritas implementasi adalah strategi cukup besar baik dari eksternal maupun internal Kabupaten Nias Selatan. Adapun urutan prioritas strategi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Menghadapi kecenderungan persaingan dengan daerah lain yang semakin kompetitif dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM baik di bidang pariwisata dan perpajakan.
 - b) Untuk menghadapi yang namanya persaingan dengan daerah wisata lain yang memiliki karakteristik masing masing khususnya di daerah sumatra utara yang

sudah lebih maju di banding Kabupaten Nias Selatan , pemerintah daerah harus lebih giat dalam membenahi di berbagai sektor seperti sektor infrastuktur, sektor transportasi , sektor SDM dan sektor perpajakan. Dengan meningkatkan di berbagai sektor tersebut khususnya di bidang SDM yang menurut saya masih jauh tertinggal dengan daerah lain padahal Kabupaten Nias Selatan memiliki lokasi surfing terbaik ke-2 (dua) di dunia setelah pantai di taiwan seandainya ini di dukung dengan infrastruktur baik di bidang jalan ke lokasi pariwisata, hotel yang bertaraf internasional, restoran yang menyajikan makanan laut yang berasal dari Kabupaten Nias Selatan sendiri akan lebih menguntungkan baik pemerintah Kabupaten Nias Selatan maupun masyarakat sekitar, dengan itu semua terlebih dahulu masyarakat Kabupaten Nias Selatan harus lebih siap dalam menghadapi arus global yang lambat laun akan sampai ke daerahnya. Bisa kita ketahui bahwa Kabupaten Nias selatan memiliki luas 1.825 km persegi dan memiliki 104 gugusan pulau besar dan kecil tetapi hanya 21 pulau yang berpenghuni, dengan 35 kecamatan dan kepadatan penduduknya hanya 150 jiwa perkilometer persegi ini menunjukkan kurangnya pengoptimalan dari pulau yang lain oleh masyarakat maupun pemerintah. Bisa di bayangkan terdapat total 275.422 jiwa yang merupakan penduduk Nias Selatan belum terhitung pendatang-pendatang yang hanya memadati di 4 pulau utama seperti Pulau Tanah Bala, Pulau Tanah Masa, Pulau Tello, Pulau pini. Pengoptimalan ini juga akan berdampak bagi pemerataan penduduk untuk memberikan keleluasaan dalam menggarap lahan-lahan yang belum tersentuh atau terjamah oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan, dan sebagai mana kita ketahui pendapatan utama masyarakat Nias adalah dari sektor pertanian dengan luas wilayah 81 ribu hektar lebih dan itupun kurang di optimalkan dengan baik karna kurangnya SDM di bidang pertanian. Karena Nias Selatan merupakan daerah kepulauan maka tentu bidang kelautan seperti menjadi nelayan juga bisa menjadi mata pencaharian utama tetapi lagi-lagi terkendala SDM yang kurang profesional di berbagai bidang yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah yang besar untuk Kabupaten Nias Selatan. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nias Selatan perlu adanya campur tangan dari pemerintah atau berbagai dinas terkait untuk melakukan pelatihan ataupun penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat lebih sejahtera kedepannya, dengan masyarakat yang sudah lebih sejahtera maka selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi di bidang perpajakan dan betapa pentingnya pajak untuk pendapatan asli daerah mereka sendiri agar pembangunan daerahnya dapat lebih di tingkatkan lagi.

- c) Menyiapkan moda transportasi, hotel dan restoran yang lebih baik lagi, ini bisa terwujud dengan bantuan dana APBD dari pemerintah kota, provinsi dan pusat.

Transportasi utama di Kepulauan Nias ada 3 yaitu jalur darat, jalur udara dan jalur laut. Untuk jalur laut, masyarakat di Nias sudah biasa menggunakan perahu bermesin tunggal untuk jarak dekat dan kapal feri untuk tujuan yang lebih jauh, untuk mereka yang ingin pergi keluar Pulau Nias bisa melalui jalur laut maupun udara , untuk jalur udara sendiri ada beberapa maskapai yang menyediakan rute ke Pulau Nias dan dapat di tempuh dengan waktu 1 jam dan membutuhkan biaya sekitar Rp.300.000,- Sedangkan apabila kita lebih memilih jalur laut kita membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 malam atau sekitar 12 jam terlebih lagi

faktor alam juga mempengaruhi seperti tinggi ombak, kuat arus dan angin yang sangat berpengaruh dalam waktu tempuh sehingga para masyarakat akan lebih memilih jalur udara akan tetapi itu semuapun bukan tanpa hambatan dikarenakan hanya masih ada satu bandara yaitu bandara binaka yang berada di Gunung Sitoli

Faktor-Faktor yang Menghambat Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya realisasi pajak hotel dan restoran antara lain:

Kurangnya pengetahuan mengenai pajak oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

- a) Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peranan dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan.
- b) Kesadaran membayar pajak masyarakat Kabupaten Nias Selatan masih kurang.
- c) Kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Peranan Dan Fungsi Pajak Bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Masih banyak dari masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang belum mengetahui mengenai peranan dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan, Sehingga penerimaan pajak di Kabupaten Nias Selatan masih kurang maksimal, khususnya penerimaan pajak hotel dan restoran. Mengapa masyarakat Kabupaten Nias Selatan masih banyak yang belum paham peranan dan fungsi pajak itu sendiri, ini dikarenakan kurangnya informasi yang di terima masyarakat baik secara lisan maupun tulisan di acara-acara formal maupun non formal, padahal dinas terkait dapat membuat acara-acara yang bertemakan pajak seperti seminar di bidang perpajakan, penyuluhan ke daerah-daerah dan pekan pajak daerah, di situ para profesional pajak dapat memberikan materi-materi di bidang perpajakan dan sekaligus memberitahu cara membayar pajak yang sekarang sudah menggunakan sistem *ebiling* atau sistem pembayaran secara online yang lebih praktis yang tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak.

Kesadaran Membayar Pajak Masyarakat Kabupaten Nias Selatan Masih Kurang

Kesadaran yang masih kurang di dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat banyak yang tidak tahu peranan ataupun fungsi dari pajak itu untuk daerahnya. Setelah masyarakat paham Mengenai Peranan Dan Fungsi Pajak Bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, secara berkala masyarakat akan mulai sadar membayar pajak dikarenakan sudah pahamnya masyarakat betapa pentingnya pajak untuk menambah PAD daerah Nias Selatan untuk mendorong laju pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan di berbagai bidang seperti bidang transportasi, bidang fasilitas umum, penerangan jalan dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan semestinya bisa memberikan pembangunan yang nyata untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Setelah masyarakat meningkat kepercayaannya dengan melihat pembangunan yang nyata dari pemerintah maka masyarakat akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajaknya.

Kurangnya Tenaga Profesional Di Bidang Perpajakan

Tenaga profesional di bidang perpajakan menjadi faktor penting mengapa masih banyak masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang belum paham mengenai peranan dan fungsi pajak bagi pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, ini dikarenakan masih sedikitnya pekerja di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan yang menjadi lulusan di bidang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pemungutan pajak secara intensif yang diikuti dengan Perda sebagai penguat pelaksanaan pemungutan pajak, meningkatkan kualitas personil perpajakan dengan melakukan inventarisasi perlengkapan perpajakan serta program diklat agar pegawai perpajakan lebih proaktif, profesional dan bersih sebagai pendorong peningkatan PAD. Kegiatan ini dilakukan di tiap-tiap daerah guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Selama ini penyuluhan yang diberikan dirasakan belum memuaskan, masyarakat sekarang lebih kritis untuk menilai berbagai penyuluhan dan pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil pajak yang telah mereka bayarkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menghambat peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peranan dan fungsi pajak bagi pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan, kurangnya kesadaran pengusaha dalam membayar pajak khususnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Nias Selatan, dan kurangnya tenaga profesional di bidang perpajakan. Dalam hal ini faktor faktor yang menghambat sangat berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Nias Selatan harus lebih tanggap dalam melakukan penyuluhan dan penyediaan tenaga profesional di bidang perpajakan.
2. Strategi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan strategi WT yakni dengan menyiapkan moda transportasi, hotel dan restoran yang lebih baik lagi, ini bisa terwujud dengan bantuan dana APBD dari pemerintah Kabupaten, provinsi dan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, Gadis, Dr. 2006. *Feminisme: Sebuah kata Hati*. Jakarta: Kompas
- Asfar,M. 2004. *Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Azwar Saifuddin, MA. 2008. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiarjo, Miriam, Prof. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Fakih, Mansor, Dr. 2006. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Prasetya, Dr. 2004. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi UI.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosada Karya. Bandung



- Mashod, Mohtar dan Nasikun. 2007. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: PAU- Studi UGM
- Mubarak, Mufti. 2015. *Suksesi Pilkada*. Surabaya: PT. Jaya Pustaka Media Utama
- Nursal, Adman, 2014. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Ridwan, Asep. 2014. Memahami Prilaku Pemilih Pada Pemilu 2004 di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan HAM*. Vol. 4. No. 1.
- Salossa, Daniel. 2005. *Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Media Presindo
- Sudijono. 2015. *Perilaku Politik*. Semarang: PT. Gramedia
- Surbakti, Ramlan. 2012. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Sihite, Romani. 2007. *Kandidat Caleg Perempuan Agar Kasih Ibu Terpancar di Parlemen*. Jakarta: Yayasan Kandidat.
- Uhlin, Andres. 2008 . *Oposisi Berserak*. Bandung: Mizan
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.



https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah